

PENATAAN PASAR TRADISIONAL DIMUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO

Hamirul¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Jl. Setih Setio No.5 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo Jambi
email: hrul@ymail.com¹

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penataan pasar tradisional yang ada di Muko-muko Bathin VII kabupaten Bungo, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 15 orang. Hasil penelitian ini Pemerintah Kecamatan hanya melakukan pembinaan saja terhadap Pasar Tradisional yang ada Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, dan langsung di urus atau dikelola dusun masing-masing, penataan pasar tradisional masih kurang rapi karena kekurangan los dan lokasi untuk pembangunan los baru dan sarana pendukung lainnya.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun dalam Penataan Pasar Tradisional adalah di sebabkan terbatasnya lahan untuk pembangunan los dan sarana pendukung lain, pemahaman tentang administrasi, dan tidak memahami dalam pengelolaan dan manfaat dari pasar tradisional terhadap pentingnya administrasi dalam tata kelola dan penataan pasar yang rapi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun dalam mengatasi hambatan yang di temui adalah meningkatkan kemampuan pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, membangun los dan sarana lain yang dilakukan pemerintah dusun, dan meningkatkan pengawasan.

Kata Kunci: Penataan Pasar Tradisional, Muko-Muko Bathin VII, Bungo

Abstract

This article aims to find out the traditional market arrangement in Muko-muko Bathin VII Bungo district, using a descriptive method with a Qualitative approach. Data collection techniques used were interviews with 15 informants. The results of this study are only the District Government fostering traditional markets in Muko-Muko Sub-District VII Bathin, and directly managed or managed by each hamlet, traditional market arrangement is still not neat because of the lack of stalls and locations for the construction of new stalls and facilities other supporters.

The obstacles faced by the Hamlet Government in the Structuring of Traditional Markets are caused by the limited land for the construction of stalls and other supporting facilities, understanding of administration, and not understanding the

management and benefits of traditional markets on the importance of neat governance and market arrangement.

The efforts made by the Hamlet Government in overcoming the obstacles encountered were to increase the ability of the administrators of the Traditional Market in Muko-Muko Bathin VII Subdistrict, to build stalls and other facilities carried out by the hamlet government, and to improve supervision.

Keywords: Structuring Traditional Markets, Muko-Muko Bathin VII, Bungo

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sejak zaman dulu memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat, selain itu juga berfungsi sebagai tempat bermuaranya produk-produk rakyat di sekitarnya dan merupakan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Perkembangan pasar modern bukan penyebab utama redupnya pasar tradisional tetapi karena infrastruktur pasar tradisional semakin memburuk, pengorganisasian para Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pelaksanaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Sejauh ini pasar tradisional memegang peran penting dalam perkembangan di bidang perekonomian Indonesia, tetapi telah terbentuk citra sebagai tempat belanja yang kumuh, becek, jorok, infrastruktur tidak nyaman dan tidak memadai yang menjadi faktor menurunnya daya saing dengan tempat

perbelanjaan lainnya seperti *mall* dan *minimarket* yang mempunyai kualitas kenyamanan bagi pengunjungnya.

(Aliyah, Daryanto, & Rahayu, 2009), Pengaruh kenyamanan terhadap keuntungan usaha tidak signifikan, artinya bahwa rendahnya tingkat kenyamanan pasar tidak mempengaruhi keuntungan usaha pedagan pasar tradisional.

(Aliyah, Daryanto, & Rahayu, 2009), Dalam merumuskan strategi pengembangan pasar tradisional di Surakarta hal yang harus diperhatikan adlaah jenis barang dagangan yang menjadi kekhasan lokal kota Surakarta yang meliputi komoditas lokal berupa batik, dan cinderamata berupa barang antik, model perbelanjaan yang masih tradisional dengan pola tawar menawar dan kontak langsung dengan penjual atau bahkan pengrajin, akan menambah kepuasan para wisatawan

dalam berbelanja, model penataan ruang atau setting ruang yang tidak formal atau kaku, sehingga para wisatawan dapat berlama-lama tanpa merasa sungkan dengan pelayanan yang ramah dan sabar dari penjual. Fasilitas pendukung dan fasilitas umum yang memadai sehingga para wisatawan dapat nyaman berbelanja serta adanya pusat informasi yang lengkap dan jelas bagi produk-produk khas lokal dan cinderamata.

Ayuningsasi, A. A. K. (2016), Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat. Pembenahan dan pengembangan pasar tradisional tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, pengelola pasar, dan para pedagang pasar tradisional itu sendiri. (Arianty, 2013), hasil penelitiannya bahwa kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan pasar tradisional dikategorikan cukup baik.

(Zunaidi, 2013), kehidupan sosial ekonomi atau kesenjangan pedagang tradisional Babat sebagai mana imbas adanya perubahan.

Pasar tradisional juga menjadi salah satu pembangkit dari kemajuan ekonomi suatu wilayah dan dapat dijadikan sebagai indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah harus tanggap terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunannya terdiri dari kios-kios, gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar terjadi apabila ada tempat untuk berniaga ada barang dan ada jasa yang akan diperdagangkan, terdapat penjual barang tertentu, adanya hubungan dalam transaksi jual beli, kondisi pasar yang kumuh dan kotor juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang diminati oleh masyarakat. hingga saat ini pasar tradisional di seluruh Indonesia mencapai 13.450 unit dan mampu menampung lebih

dari 12.625.000 pedagang. Menurut Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) pada tahun 2005 sebanyak 400 kios tutup setiap tahunnya karena kalah saing dengan pasar modern. Menurut wakil menteri

perdagangan (Wamendag) pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4 persen dan pasar rakyat minus 8,1 persen sehingga pendapatan pasar domestik semakin berkurang.

Tabel 1

Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII saja masih banyak pasar yang tidak mampu menampung para pedagang yang jumlahnya banyak. Ini menunjukkan betapa masih sangat dibutuhkannya pasar tradisional bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, selain itu pasar tradisional memiliki peran dalam hal memberikan tambahan pendapatan bagi suatu daerah.

Untuk itu, maka pemerintah harus lebih memperhatikan terhadap penataan pasar-pasar yang ada di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dengan tujuan koordinasi tetap berjalan, untuk mencapai maksud tersebut. Maka kerjasama harus dilakukan dalam banyak hal, dapat dilihat bahwa koordinasi dalam

penataan pasar belum maksimal, di mana banyaknya peluang bagi pedagang untuk tidak menaati peraturan penataan pasar yang sebenarnya sehingga membuat pasar kurang rapi. Peran pemerintah ialah memberi pembinaan kepada pemerintah dusun agar melakukan penataan pasar yang rapi dan menyampaikan kepada pengawas pasar agar lebih sering melakukan pengecekan terhadap susunan atau penataan pasar, peran pemerintah dalam memberikan motivasi kepada pedagang dan penjual bagaimana pentingnya menjaga kebersihan pasar tidak harus menunggu petugas kebersihan yang melakukan pembersihan pasar itu meskipun pedagang sudah membayar uang

kebersihan, tetapi kerjasama itu sangat diperlukan agar pasar tradisional tidak di pandang sebagai pasar yang jorok. Memberikan pelatihan-pelatihan

kepada pengurus pasar agar mereka mempunyai kemampuan dalam melakukan administrasi.

Tabel 2

Di tengah persaingan pasar tradisional dengan pasar modern dan *hypermarket*, namun pasar tradisional mampu bertahan dengan kuantitas yang lebih besar maka pasar tradisional mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat. Namun pada kondisi *trend* masyarakat memilih pasar modern. Selain itu pada pasar tradisional juga terdapat persaingan usaha antar pasar tradisional sehingga dikarenakan hal-hal tersebut dapat menyebabkan penurunan skala pelayanan pasar tradisional. Sedangkan pada pasar modern mengalami kenaikan tingkat pelayanan dikarenakan dengan membuat promosi dan potongan harga. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan skala pelayanan pasar tradisional di Muara Bungo terutama khususnya di Kecamatan

Muko-Muko Bathin VII. Dalam hal ini, maka disinilah timbul peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penataan pasar seperti adanya petugas kebersihan pasar dan petugas keamanan pasar. Salah satu instansi pemerintah yang peneliti amati adalah Kantor Camat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo dimana penataan pasar yang belum maksimal karena lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah dusun, hal ini dapat diketahui dari indikasi yang ada, antara lain :

1. Sarana dan prasarana pasar yang tidak memadai seperti tidak ada tempat pembuangan sampah organik dan non organik, toilet, kamar mandi dan tempat parker seadanya.
2. Penataan pasar yang tidak rapi karena penempatan pedagang tidak

- sesuai dengan jenis dagangan yang mereka jual, seperti pedagang pakaian bercampur dengan pedagang sayuran dan barang lainnya.
3. Kurangnya partisipasi pedagang terhadap kebersihan pasar, apabila pasar sudah selesai maka sampah bertebaran dimana-mana tidak adanya partisipasi dari pedagang untuk ikut serta membersihkan pasar, karena mereka menganggap sudah membayar uang kebersihan jadi tidak perlu lagi mengurus masalah sampah, walaupun begitu kerjasama antara pedagang dengan petugas kebersihan pasar itu sangat diperlukan agar tercipta pasar yang baik dan bersih.
 4. Tempat parkir yang tidak memadai karena lokasi pasar yang kurang memadai maka untuk parkir menggunakan halaman rumah orang yang berda disekitar pasar dan tidak ada petugas parkirnya.
 5. Jumlah los dan gerai tidak sesuai dengan jumlah pedagang los dan gerai yang kurang membuat sebagian pedagang memakai

sebagian jalan untuk tempat mereka berdagang.

6. Pedagang yang tidak mematuhi batas tempat yang diizinkan contohnya pedagang yang tidak kebagian tempat menggunakan sebagian jalan untuk tempat mereka berdagang meskipun ada dampak negative yang akan terjadi apabila mereka berdagang menggunakan sebagian jalan karena kendaraan terus ada.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Lubis Pasar Tradisional adalah pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan suasana yang relatif kurang menyenangkan (ruang tempat usaha sempit, sarana parkir yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik).

Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembeliannya dengan sistem tawar

menawar. Para pedagangnya sebagian besar adalah golongan ekonomi lemah dan cara berdagangnya kurang profesional. Secara umum pasar dapat ditinjau dari dua segi utama, yaitu segi sosial ekonomis dan segi fisik.

Berdasarkan segi sosial ekonomis, pasar dibedakan pengertiannya menjadi 3 yaitu :

1. Secara kultur, pasar adalah tempat kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang tanpa memandang apakah tempat itu disediakan secara resmi atau tidak oleh pemerintah setempat.
2. Secara administrasi, pasar diartikan sebagai tempat kegiatan perdagangan eceran yang dibedakan atas pasar resmi dan tidak resmi. Pasar resmi ditetapkan oleh pemerintah kota berdasarkan surat keputusan kepala daerah setempat. Sedangkan pasar tidak resmi, tidak diakui secara hukum, namun diakui keberadaannya (*de facto*). Pasar-pasar tersebut secara tetap ditarik retribusinya.
3. Secara fungsi, pasar merupakan tempat berbelanja barang-barang

kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh penduduk secara keseluruhan, tempat bekerja (berdagang) dan memberikan pendapatan kepada pedagang, dan sebagai fasilitas perkotaan yang memberikan pendapatan kepada pedagang, dan sebagai fasilitas perkotaan yang memberikan pendapatan bagi pemerintah kota.

Berdasarkan segi fisiknya, pasar diartikan sebagai pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau ruangan tertutup atau suatu bagian tepi jalan. selanjutnya pengelompokkan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen, ataupun permanen. Karakteristik umum kegiatan pasar tradisional sebagai berikut:

1. Pengelolaan:
 1. Dikelola oleh pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Pasar)
 2. Terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan/rumah tangga yang pengelolaannya masih

- tradisional (umumnya berdasarkan bakat dan naluri)
3. Organisasi: Ada koperasi pedagang pasar, tetapi organisasi dalam pengelolaan kegiatan berdagangnya sendiri tidak ada
 4. Kondisi fisik tempat usaha:
 - 1) Bangunan temporer, semi permanen atau permanen, terdiri atas toko, kios, los dan pelataran.
 - 2) Kebersihan tidak terjaga dengan baik (becek, kotor, bau, dll) sehingga mengurangi kenyamanan berbelanja
 - 3) Gang antar kios/los terlalu sempit sehingga mengurangi keleluasaan bergerak
 - 4) Fasilitas parkir tidak memadai
 5. Barang:
 - 1) Barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan rumah
 - 2) yang dijual umumnya lebih segar dan bervariasi.
 - 3) Harga tangga sehari-hari (barang primer dan sekunder), bahan pangan pokok yang tidak tahan lama cukup menonjol.
 - 4) Barang barang relatif murah, tidak bersifat mati dan dapat ditawarkan.
 - 5) Penataan barang seadanya.
 6. Hubungan antara penjual dan pembeli:
 - 1) Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli terlihat dari adanya tawar-menawar dalam proses jual beli
 - 2) Waktu kegiatan:
 - 3) Waktu kegiatan harian rata-rata dimulai pukul \pm 06.00 hingga pukul 15.00/16.00 (9-10 jam). Namun adapula pasar yang dimulai pada malam hari.
 7. Mekanisme perolehan komoditas: Barang-barang yang dijual di pasar tradisional diperoleh dari pasar induk/pasar yang lebih tinggi tingkatannya.
 8. Lokasi:

Pada awalnya pasar tumbuh tanpa perencanaan karena berkembang dengan sendirinya, dan biasanya berlokasi di tempat-tempat yang dianggap strategis dan aksesibilitasnya baik (mudah dijangkau).
-

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan mahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial

Sekretaris kecamatan; Seksi Perekonomian; 3 (tiga) Rio (Rio Tanjung Agung, Rio Bedaro, dan Rio Tebing Tinggi); 3 (tiga) Pengawas Pasar (Pengawas Pasar Tanjung Agung, Pasar Bedaro dan Pasar Tebing Tinggi); 3 (tiga) orang Penjual; 3 (tiga) orang Pembeli.

HASIL DAN DISKUSI

atau kemanusiaan Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik Nonprobability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling (sampel bertujuan) dengan informan sebanyak 15 orang terdiri dari : Camat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;

Berdasarkan wawancara dengan Pak Camat, bahwa kami dari pihak Kecamatan hanya melakukan pembinaan saja, teknis operasionalnya langsung diurus oleh Pemerintah Dusun bersangkutan, dan kami hanya menyarankan masalah untuk mengajukan pembangunan pasar, bagaimana kepengurusan dan penataan pasar yang baik, penerapan permasalahan keuangan. Selanjutnya

kepada dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain dibantu oleh Kaur yang ada di dusun. Pelaksanaan operasional pasar seharusnya dikelola oleh Pengurus Pasar dibawah Pengawasan dan Pembinaan Rio. Namun berdasarkan wawancara dengan salah seorang pembeli, bahwa Pengelolaan dan Penataan Pasar Dusun sebagian besar masih dipegang oleh Rio, termasuk pengelolaan dana yang didapat dari hasil pungutan di pasar dusun. Jenis retribusi pasar dusun untuk para pedagang terdiri dari; Retribusi Pelataran, dan Retribusi Parkir.

Salah seorang pembeli membenarkan sejauh ini memang belum ada pemasukan dari hasil pemungutan yang dilaporkan secara transparan, tetapi tidak ada kejelasan penyebabnya karena menyangkut nama orang-perorang jadi tidak etis.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Perekonomian, bahwa memang tidak ada kejelasan masalah retribusi yang sebenarnya karena tidak ada laporan dari Pemerintah Dusun masalah pasar kepada pemerintah

kecamatan padahal sudah dikasih surat kesetiap pasar dusun bahwa setiap akhir bulan melapor kekecamatan atas perkembangan pasar dusun.

Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Koordinasi Penataan Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, maka penulis mencoba melihat dari berbagai persepsi dibawah ini.

Peran Pemerintah dalam Koordinasi Penataan Pasar Tradisional pada Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo terdapat 3 pasar yang mana dusun yang memiliki pasar adalah Dusun Tanjung Agung, Dusun Bedaro dan Dusun Tebing Tinggi, kami dari pihak Kecamatan hanya melakukan pembinaan saja kalau pengelolaan pasar langsung dusun itu sendiri. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa/Rio mempunyai fungsi yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat.

2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa.
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik dibidang pemerintahan, pemangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka dusun berpedoman kepada, yaitu:

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Penegelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Berdasarkan wawancara dengan pedagang, bahwa potensi pengelolaan dan penataan pasar dusun seharusnya bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan dusun melalui pengelolaan dan penataan secara baik dan rapi.

Hal ini juga didukung oleh seorang pembeli bahwa pengelolaan dan penataan pasar dusun belum rapi karena masih ada pedagang yang berjualan pada tempat yang tidak sesuai dengan jenis dagangan mereka.

Di samping itu, pedagang juga mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada kebijakan pemerintah dalam penambahan los dan serana pendukung lain seperti kamar mandi dan toilet. Hal ini juga didukung oleh pedagang lain, bahwa bukan kami tidak menaati batas izin tempat berdagang tetapi los dan tempat untuk berdagang tidak ada sehingga kami menggunakan sebagian jalan untuk tempat kami berdagang.

Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi penataan pasar dan pengelolaan pasar dusun diharapkan adanya penambahan los dan pembangunan kamar mandi dan toilet sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pedagang dan pembeli.

Penanganan aspek keamanan sampai saat ini dilakukan terbatas pada sisi keamanan yang berkaitan dengan

kejahatan, seperti pencopetan, pencurian dan perampokan, sedangkan aspek keamanan dari berbahaya kebakaran belum banyak ditangani secara serius, dan aspek pembinaan pedagang merupakan tanggungjawab pengurus pasar belum tersentuh.

Padahal kemitraan antara pedagang dan pengurus pasar harus terwujud antara lain melalui pembinaan kepada para pedagang melalui pengenalan kepada mereka tentang manajemen keuangan, serta cara penataan (displai) barang dagang yang menarik, karena bagaimanapun juga, fungsi dan tugas pokok pengurus pasar dapat berjalan lancar jika para pedagang juga bersedia terlibat di dalamnya.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo sesungguhnya mempunyai potensi besar terhadap penyumbangan pendapatan dusun. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan perhatian dari Rio untuk mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional

Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Tradisional pada Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Perekonomian bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah memberi bantuan setiap pasar dusun sudah difasilitasi 1 unit kendaraan roda tiga setiap pasar dari program samisake untuk sarana kebersihan pasar.

Citra buruk yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatarbelakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar, perilaku pedagang pasar dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekaligus memerlukan waktu lama.

Perbedaan persepsi bahwa perilaku pedagang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi umumnya pasar tradisional memiliki citra buruk,

dilapangan dijumpai peran pengelola pasar terutama aparaturnya pemerintahan dalam mengupayakan perbaikan perilaku pedagang pasar tradisional masih sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan lemahnya Peran Rio Dusun Tanjung Agung, Dusun Bedaro dan Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan pasar tradisional, baik kepada pedagang maupun kepada masyarakat.

Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Dalam situasi di mana peran pasar lebih ditekankan sebagai salah satu penghasil pendapatan dusun, maka perlu peningkatan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana pasar dusun. Dalam praktik yang paling banyak dijumpai adalah pengelolaan dana

pasar belum dilakukan sesuai dengan standar penatausahaan keuangan desa dan sejauh ini belum ada pertanggungjawaban dari pengelola pasar kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan, bahwa tidak ada pertanggungjawaban dana pasar disebabkan karena adanya kesenjangan kepengurusan pasar, atau dengan nama lain karena ketidakjelasan tugas pengurus pasar.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Koordinasi Penataan Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

- a. Keterbatasan Sumberdaya Manusia Pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Perekonomian, bahwa tidak ada kejelasan masalah keuangan pasar, berapa persen untuk kas desa dan berapa persen untuk petugas

kebersihan pasar, karena tidak adanya laporan masuk kekecamatan.

Sedangkan menurut Sekretaris Camat bahwa pengurus pasar dusun mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pengadministrasian dana pasar dusun, karena sebagian besar pengurus belum memahami teknis administrasi. Terakhir menurut Rio dusun Tanjung Agung, bahwa pihaknya mengakui adanya kekurangan Sumber Daya Manusia dari pengurus harian pasar dusun, baik dari segi keterampilan atau keahlian, maupun dari jumlah personil yang ada untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pasar.

- b. Keterbatasan Tempat Untuk Para Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang pasar bahwa sesungguhnya bukan kami tidak mematuhi batas izin berdagang hanya lokasi yang minim membuat kami memakai bagian jalan untuk tempat berjualan. Hal tersebut juga didukung

oleh pedagang lain, bahwa penataan pasar yang tidak rapi disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah dusun.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rio Dusun Bedaro, bahwa dusun sudah mengajukan kepada Dinas Pasar sampai sekarang belum ada realisasi alasan kontribusi tidak ada pada dinas pasar untuk pasar dusun.

Sedangkan menurut Rio dusun Tanjung Agung mengingat dan melihat lokasi pasar yang kurang memadai, kemungkinan pasar Tanjung Agung tidak ada penambahan los dan serana lain seperti toilet, kamar mandi.

- c. Kurangnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus pasar dusun, bahwa petugas pembinaan dari Kecamatan relatif jarang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar dusun. Hal tersebut juga didukung oleh pedagang pasar dusun, bahwa mereka jarang melihat Aparatur Pemerintah

Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penataan pasar dusun.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Perekonomian bahwa tidak adanya laporan setiap bulan dari pengurus pasar mengakibatkan kami dari kecamatan tidak mengetahui bagaimana perkembangan dari pasar dan masalah-masalah apa saja yang sedang dialami oleh pengurus pasar, sedangkan kami dari kecamatan sudah mengirim surat ke setiap pasar dusun agar setiap bulan memberi laporan kekecamatan atas perkembangan pasar dusun tetapi tidak ada tanggapan.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penataan Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

Berdasarkan wawancara dengan Rio Dusun Bedaro, bahwa untuk

meningkatkan pengelolaan dan penataan pasar diperlukan pembinaan yang instensif dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Hal senada juga diakui oleh Rio Dusun Tanjung Agung, bahwa Pemerintah Kecamatan diharapkan merencanakan program pelatihan dan sosialisasi terhadap semua pengurus pasar yang ada dikecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Sedangkan menurut salah seorang pengelola pasar tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, bahwa mereka memerlukan pembinaan secara mental dan teknis untuk meningkatkan wawasan dan motivasi kerja dilapangan secara berkesinambungan. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh pengawas pasar Tanjung Agung diharapkan dari pihak kecamatan bilamana mereka turun lapangan mengecek pasar agar memberi arahan kepada pedagang, pembeli dan pengurus pasar bagaimana penataan pasar yang baik dan bagaimana memanfaatkan lokasi pasar yang ada, bagaimana cara menjaga kebersihan

pasar serta cara pengelolaan administrasi keuangan pasar yang baik.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa kondisi nyata yang terjadi adalah kekurangan SDM, baik secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu perlu diprogramkan oleh pemerintah kecamatan untuk bekerjasama dengan pengurus pasar dan instansi lain untuk melakukan pembinaan secara instensif dan berkesinambungan.

b. Upaya Membangun Los Dan Sarana Lain Yang Dilakukan Pemerintah Dusun.

Berdasarkan wawancara dengan Rio Dusun Bedaro, bahwa pada tahun 2016 ini akan dibangun los, toilet dan kamar mandi dipasar Bedaro melalui usulan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan demikian akan mudah menata pasar supaya lebih rapi lagi. Hal ini senada diakui oleh Rio Dusun Tebing Tinggi bahwa di tahun 2016 ini dipasar Tebing Tinggi akan dibangun los tambahan, toilet dan kamar mandi melalui Program Daerah Pemberdaya Masyarakat (PDPM) agar penataan pasar mudah diatur.

c. Meningkatkan Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Berdasarkan wawancara dengan Rio Dusun Tebing Tinggi, bahwa Pemerintah Dusun mengharapkan kepada Pemerintah Kecamatan Muko-Muko Bathin VII untuk meningkatkan dan memprogramkan jadwal pembinaan secara rutin terhadap pengelolaan pasar tradisional. Hal senada juga dikatakan oleh Pembeli, bahwa pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengurus dalam pengelolaan retribusi pasar untuk pencapaian target penerimaan pendapatan pada pasar tradisional.

SIMPULAN

Pemerintah Kecamatan hanya melakukan pembinaan saja terhadap Pasar Tradisional yang ada Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, dan langsung di urus atau dikelola dusun masing-masing, penataan pasar tradisional masih kurang rapi karena kekurangan los dan lokasi untuk pembangunan los baru dan sarana pendukung lainnya.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun dalam Penataan Pasar Tradisional adalah di sebabkan terbatasnya lahan untuk pembangunan los dan sarana pendukung lain, pemahaman tentang administrasi, dan tidak memahami dalam pengelolaan dan manfaat dari pasar tradisional terhadap pentingnya administrasi dalam tata kelola dan penataan pasar yang rapi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun dalam mengatasi hambatan yang di temui adalah meningkatkan kemampuan pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, membangun los dan sarana lain yang dilakukan pemerintah dusun, dan meningkatkan pengawasan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran

Ilustrasi

Tabel 1Jumlah Los/KiosPasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

| No | Pasar | Jumlah Los/Kios | Los/Kios Terpakai | Los/Kios Tidak Terpakai |
|----|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|----|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|

yang dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pihak pengurus Pasar Tradisional Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dalam pengelolaan dan penataan pasar sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan kepada pengurus dusun dalam pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang lebih baik.
2. Agar Pemerintah Dusun menggunakan pasar secara maksimal, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pasar dan penataan pasar dan mencerminkan sikap positif.
3. Agar Pemerintah Dusun lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan masalah peningkatan keahlian pengurus pasar dan penambahan los pasar dusun.

| | | | | |
|----|---------------------|-----|-----|----|
| 1. | Pasar Tanjung Agung | 65 | 52 | 13 |
| 2. | Pasar Bedaro | 40 | 34 | 6 |
| 3. | Pasar Tebing Tinggi | 58 | 42 | 26 |
| | Jumlah | 163 | 128 | 35 |

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII (2017)

Tabel 2 Retribusi Pasar Tradisional Sebelum Dan Sesudah Ada Hypermart

| No | Tahun | Sebelum | Sesudah |
|----|-------|------------|------------|
| 1. | 2011 | Rp.2.000,- | Rp.2.000,- |
| 2. | 2012 | Rp.2.500,- | Rp.2.500,- |
| 3. | 2013 | Rp.2.500,- | Rp.2.500,- |
| 4. | 2014 | Rp.3.500,- | Rp.3.700,- |
| 5. | 2015 | Rp.4.000,- | Rp.4.400,- |
| 6. | 2016 | Rp.5.000,- | Rp.5.500,- |

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII (2017)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aliyah, I., Daryanto, T. J., & Rahayu,

M. jani. (2009). Peran pasar tradisional dalam mendukung pengembangan pariwisata kota Surakarta. *Gema Teknik*, 10(2), 111–118. Retrieved from <http://ced.petra.ac.id/index.php/gem/article/view/17613>

Andriani, M. N., & Ali, M. M. (2013).

Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta.

Teknik PWK, 2(2), 252–269.

Retrieved from

<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2351>

Arianty, N. (2013). 0.05], 13(1), 18.

Ayuningsasi, A. A. K. (2016). Analisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah program revilitasi Pasar tradisional di kota denpasar (studio kasus pasar sudah merta desa sidakarya). *Anak Agung Ketut Ayuningsasi*, 7(1), 1–12. Retrieved from

- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ramida/article/view/3011%0A>
- Bennett, D. M. (2014). [No Title]. *British Journal of Psychiatry*, 205(1), 76–77.
<https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Ilham, N. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Usaha Dagang pada Pasar Tradisional di Kabupaten Pangkep. *Universitas Hasanuddin*, 10.
- Impact, T., Modern, O., Operation, M., Traditional, T., Tradesman, M., In, I., & City, P. (2007). Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan, 29–38.
- Jati, W. R. (2012). Dilema Ekonomi: Pasar Tradisional Versus Liberalisasi Bisnis Ritel di Indonesia Periode 2004-2011. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 4(2), 223–242.
- Ko, W., & Semaran, K. (2013). No Title, 2(3), 539–548.
- Kuncoro, P. M., Ph, D., & Sc, M. S. (2008). Strategi pengembangan pasar modern dan tradisional, 1–23.
- Purwanto, W. (2012). j. +Persaingan+Antara+pasar, 5, 113–124.
- Ryani, D. (STIE M. (2011). Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang. *Dinamika Manajemen*, 2(2), 169–180.
- Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97–115.
<https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880>
- Studi, P., Wilayah, P., Kota, D. A. N., Arsitektur, S., & Kebijakan, D. A. N. P. (2008). DI KOTA BANDUNG Nama : Ade Cahya Tristyanthi NIM.
- Sulistyo, H., & Cahyono, B. (2010). Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang. *Ekobis*, 11(2), 516–526.

- Utomo, T. J. (2011). Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional Vs Modern. *Fokus Ekonomi*, 6(1), 122–133. Retrieved from <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokus/article/view/57>
- Widiandra, D. O., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Keuntungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–6.
- Zunaidi, M. (2013). Dan Pembangunan Pasar Modern, 3(1).